BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi memiliki arti yaitu pemerintahan rakyat. Jadi demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Demokrasi melalui bentuk pemerintahan dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat secara aktif dalam mengambil keputusan yang diberi wewenang. Di Indonesia sendiri pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk dari pemilu yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Negara Indonesia sudah menempatkan Pengaturan mengenai Hak pilih di dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat pada BAB XA yang terdiri dari 10 Pasal mulai dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Peraturan yang mengenai Hak Asasi Manusia disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, salah satunya yaitu Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan pengakuan yang sama di depan hukum”.¹

Berdasarkan survei *Wordlometers*, Indonesia menempati peringkat nomor empat dengan populitas penduduk terbanyak didunia dengan populasi yakni sebanyak 277

¹Jimly Asshidiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD Tahun 2002*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2005. Cetakan ketiga, hal. 162

juta jiwa atau setara dengan 3,45% total penduduk diseluruh dunia.² Dengan jumlah penduduk yang banyak tidak menjamin semua penduduk memiliki kualitas kesehatan jiwa yang baik, contohnya yaitu terdapat beberapa sejumlah penduduk yang memiliki penyandang disabilitas mental.

Penyandang disabilitas mental merupakan suatu penyakit kejiwaan seperti terganggunya pikiran, emosi atau perilaku seseorang dalam berperilaku sehari-hari. Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (selanjutnya disebut UU disabilitas mental) Pasal 4 Ayat (1) Huruf c, menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan ‘Penyandang Disabilitas Mental’ adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif”

Jumlah penyandang disabilitas mental memang menjadi minoritas dibanding dengan kelompok pemilih lainnya, namun jumlah tersebut tidak dapat diabaikan. Karena bagaimanapun Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sehingga setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hak yang dimilikinya. Tidak terkecuali orang yang memiliki penyandang disabilitas mental dalam memberikan hak pilihnya sebagai perwujudan dari warga negara Indonesia dalam pemilihan kepala daerah.

²<https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/> diakses pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 02.17 WIB

Pemilihan umum merupakan suatu kegiatan atau proses demokrasi yang sangat penting, dimana warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam memilih salah satunya pemilihan kepala daerah yang selanjutnya disebut Pilkada yang mana diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Penganti Undang-undang dan selanjutnya disebut PerPu nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

Dengan demikian, pilkada menjadi salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilihan kepala daerah yang demokrasi merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.³

Negara Indonesia sudah menempatkan Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia di dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2 (2020) hal. 358 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1726/pdf>

tahun 1945 yang terdapat pada BAB XA yang terdiri dari 10 Pasal mulai dari Pasal 28A sampai Pasal 28J hasil amandemen kedua pada tahun 2000. Peraturan yang mengenai Hak Asasi Manusia lebih luas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, salah satunya yaitu Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan pengakuan yang sama di depan hukum”.⁴

Setiap warga negara baik penyandang disabilitas mental atau tidak memiliki hak untuk memilih dalam setiap pilkada terbebas dari segala macam bentuk campur tangan dari pihak lain, intimidasi dan diskriminasi serta segala bentuk tindakan yang bisa membuat rasa takut untuk menyalurkan hak dalam proses pilkada.

Dalam pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur salah satu syarat penting bagi seseorang yang ingin menjadi peserta pemilihan kepala daerah, yaitu kondisi kesehatan mental. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa seorang calon peserta pilkada haruslah sedang tidak terganggu jiwa atau ingatannya. Artinya, hanya mereka yang secara mental dan psikologis sehat yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 135 menyatakan syarat “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu/Pilkada, yang tercantum dalam Pasal 57 ayat

⁴Jimly Asshidiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD Tahun 2002*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2005. Cetakan ketiga, hal. 162

(3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai suatu norma yang inkonstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi 135 itu kemudian menjadi rujukan dalam pembentukan Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghilangkan syarat “tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya” dalam mendaftar Pemilih pada Pilkada. Peraturan- peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggaraan pemilu di Indonesia yaitu KPU juga telah memastikan bahwa para penyandang disabilitas mental dan fisik dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah. Sesuia pada pasal 5 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjelaskan bahwa para penyandang disabilitas mental mempunyai peluang dan posisi yang sama sebagai pemilih dalam pilkada atau sebagai peserta pemilihan kepala daerah.⁵

Maka dari itu hak pilih atau hak konstitusional berlaku bagi setiap warga negara termasuk mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik. Peraturan mengenai penyandang disabilitas mental dalam undang-undang tersendiri, merupakan bentuk dari perwujudan negara hadir dalam memberikann perilaku yang sama bagi setiap warga negaranya. Perilaku hak untuk memilih pada pemilu bagi disabilitas mental sejatinya dapat dimaknai sebagai pengakuan secara

⁵Anies Prima Dewi, Idea Islami Parasatya, “Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesia,” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2019) hal. 109 <https://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/JMK/Article/Download/1108/Pdf>

utuh, bentuk penghormatan, jaminan, dan perlindungan terhadap pemenuhan hak asasi manusia kepada seluruh manusia tanpa perbedaan dan pengecualian.⁶

Namun begitu, dalam praktiknya masih ada penyandang disabilitas mental yang tidak didaftar sebagai pemilih dalam Pilkada. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang mengakui hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum, hingga saat ini belum ada norma khusus yang mengatur hal tersebut dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Putusan tersebut belum diikuti dengan langkah konkret dari pihak legislatif maupun eksekutif untuk mengatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, muncul kekosongan norma yang menyebabkan ketidakjelasan dan potensi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental dalam pelaksanaan Pilkada.

Hal itu terjadi karena penyandang disabilitas mental masih dianggap bukan subyek hukum sekaligus tidak mampu untuk mengambil keputusan secara mandiri, terutama dalam melaksanakan hak pilihnya. Praktik itu tidak selaras dengan pendekatan rangkaian proses yang sudah digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 135, karena dalam praktik tersebut pendekatan yang dilakukan lebih tepat dikatakan sebagai pendekatan “*All or Nothing*”, yaitu menyeragamkan penyandang disabilitas sebagai pihak yang tidak memiliki hak, sehingga secara otomatis dianggap

⁶Tony Yuri Rahmanto, “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 1, (2019) hal. 34 https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/570/pdf_1

tidak dapat melaksanakan atau menggunakan haknya tersebut, termasuk hak pilih dalam Pilkada.⁷

Dengan itu, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pilkada yang mempunyai tugas dan kewenangan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan sudah sepatutnya menjamin terpenuhinya hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.⁸ Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“KAJIAN YURIDIS HAK PILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI TINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang sebagaimana yang telah dianalisis penulis tertarik untuk mengambil rumusan masalah yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah bagi penyandang disabilitas mental di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan ideal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penulisan

⁷Fajri Nursyamsi dan Muhammad Nur Ramadhan “Perlindungan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pendekatan rangkaian proses pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015” *Jurnal adhyasta pemilu*, Vol. 3 No. 1 (2020) hal. 18. file:///C:/Users/USER/Downloads/Vol+3+Edisi+1+Tahun+2020-Artikel+2.pdf

⁸Nadia Rifani Putri, Tomy Michael, “*Mengkaji Disabilitas Mental Dalam Hukum Pemilu*,” Surabaya: R.A. De. Rozarie, 2019, hal. 62.

Tujuan penulisan yang ingin diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah bagi penyandang disabilitas mental di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peraturan ideal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini dilaksanakan agar mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang diinginkan peneliti sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbang pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara.
 - b. Penelitian dann Penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan secara umum dan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya mengenai hak pilih bagi warga negara yang memiliki penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum.
 - c. Diharapkan penelitian dan penulisan ini dapat menjadi pedoman untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan mendatang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah tentang pentingnya hak bagi warga negara yang memiliki penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum.

- b. Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan arahan dan kebijakan kepada masyarakat yang memiliki penyandang disabilitas mental mengenai akan kewajiban masyarakat dalam pemilihan umum.
- c. Penelitian dan penulisan ini dapat menjadi sumber *literature* bagi penelitian di masa yang akan datang serta dapat menjadi sumber pengetahuan masyarakat dalam pemilihan umum.

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak ada penafsiran yang berbeda terhadap kata dan istilah yang di gunakan dalam penelitian ini, maka penulisan menguraikan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan proposal skripsi ini untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan penulisan yaitu sebagian berikut:

1. Hak Pilih dalam pemilihan kepala daerah

Hak memilih dan dipilih (hak pilih) merupakan hak konstitusional warga negara yang di dalam sejumlah Undang-undang pemilu dan Pilkada diatur dengan sejumlah pembatasan dan perbedaan perlakuan terhadap warga negara.⁹ Pemilihan kepala daerah adalah suatu hal yang dilakukan dalam lima (5) tahun sekali untuk memilih seseorang itu menjadi pemimpin dalam suatu daerah pemerintahan. Maka dari itu, hak pilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah Hak pilih yang mana memberikan warga negara kesempatan untuk

⁹Khairul Fahmi, "Pengeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, (2017) hal. 773
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1443/342>

memilih pemimpin dan perwakilan yang mereka yakini akan mewakili kepentingan mereka di tingkat pemerintahan lokal, nasional, atau bahkan internasional. Ini adalah cara bagi individu untuk berpartisipasi dalam proses politik, mempengaruhi arah kebijakan, dan mengambil bagian dalam pembentukan masa depan negara mereka.

2. Penyandang Disabilitas Mental

Orang dalam gangguan jiwa atau disabilitas mental yang dalam istilah sehari-hari dikenal dengan gila, miring, dan istilah lainnya. Secara normatif,, dalam pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a). Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian; dan b). Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksisosial diantaranya autisme dan hiperaktif.¹⁰

3. Hak Asasi Manusia

Hak merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pendoman perilaku melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi adalah sesuatu yang

¹⁰ *Ibid*, hal. 146

bersifat mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah sehingga tak satupun makhluk bisa mengintervensinya apalagi mencabutnya.¹¹

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat di maknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. HAM juga dapat di maknai sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dimanapun dari pelanggaran atau penghianatan politik, hukum maupun sosial.¹²

Dari pembahasan empat konsep diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan empat pokok bahasan utama yaitu, hak pilih dalam Pemilihan Umum, Penyandang disabilitas Mental, Warga Negara dan Hak Asasi Manusia.

F. Landasan Teori

Teori hukum hakikatnya dibuat untuk menggambarkan suatu keadaan hukum atau menyelesaikan permasalahan hukum itu sendiri. Teori-teori tersebut adalah sebuah pemikiran yang mendalam tentang sebuah hakekat hukum di karenakan teori hukum biasanya muncul sebagai suatu jawaban yang di berikan terhadap permasalahan hukum.

1. Teori Demokrasi

Demokrasi sering diartikan sebagai kekuasaan oleh rakyat, secara demokrasi adalah keadaan negara dimana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di

¹¹Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1, hal. 56 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/425/322>

¹²Nurliah Nurdin, dan Astika Ummy Athahira. *HAM, Gender dan Demokrasi*, Penerbit CV. Sketsa Media, Jakarta, 2020, hal. 20

tangan rakyat. Banyak negara yang menerima dan menerapkan konsep demokrasi, ini disebabkan yakninya negara-negara bahwa konsep demokrasi merupakan sistem tata pemerintahan yang paling unggul di bandingkan sistem lainnya. Secara terminologi (istilah), seperti yang dikemukakan oleh Joseph A. Schemeter, Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.¹³

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM antara lain teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori *positivisme (positivist theory)* dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*). Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan.

¹³Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana, Jakarta, 2011, hal. 68

Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.

G. Orisinalitas Penulisan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang di pakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini adalah antara lain:

Tabel 1. 1

ORISINALITAS PENULISAN

NAMA PENELITI	JUDUL	RUMUSAN MASALAH
Islamiyah Ilyas	Hak politik disabilitas mental dalam pemilihan umum presepektif hukum ketatanegaraan islam. (KPU Gowa)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di KPU Gowa? 2. Bagaimana Partisipasi Politik Penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di KPU Gowa? 3. Bagaimana pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental di kabupaten Gowa?
Rasyid Rahmad	Hak konstitusional bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilhan umum presiden dan wakil presiden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan penyandang disabilitas mental atau orang dalam gangguan jiwa secara hukum dalam pemilu? 2. Apakah hak politik dapat diberikan kepada penyandang disabilitas mental dalam pemilu? 3. Apakah pembentukan

		pasal-pasal mengenai pemberian hak politik bagi penyandang disabilitas mental telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan tujuan hukum?
Rizkon Maulana, Indrianti Amarini, dan Ika Ariani Kartini	Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental? 2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami hak politik penyandang disabilitas mental?

Dari beberapa judul di atas memiliki kesamaan dengan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah penulis dan tiga referensi di atas sama-sama membahas tentang mengenai hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum. Perbedaanya yaitu terletak pada fokus penulis yang menekankan pada peraturan mengenai hak pilih bagi penyandang disabilitas dan konflik antara putusan Mahkamah Kostitusi dengan Undnag-undang nomor 8 tahun 2015 yang dimana pembahasannya berpengaruh terhadap tentang hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum dan juga dari ketiga referensi di atas membahas tentang bagaimana pemenuhan, hambatan dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

H. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yang diuraikan Sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum yang dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (pendekatan *normatif/statue*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan ini didasarkan pada perspektif-perspektif dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Pengumpulan bahan hukum

Maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Dalam hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat baik secara umum atau hanya bagi para pihak yang berkepentingan.

Adapun yang dimaksud dalam katagori bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber hukum penjelas atas sumber hukum primer. Adapun apa yang dimaksud dalam katagori bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Buku.
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Sumber-sumber lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh adalah kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.¹⁴

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif. Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan

¹⁴Seojono Seokanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2019, hlm. 13

data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpulkan untuk digunakan dalam memecahkan masalah penelitian.

Misalnya:

- a. Mensistematiskan bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti
- b. Menginterpretasikan segala peraturan perundangan-undangan yang relevan dengan yang sedang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun proposal skripsi ini, penulis menguraikan masalah yang dalam hal ini di bagi menjadi 4 (empat) bab dan sub-sub bab untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini juga merupakan permasalahan untuk bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tinjauan umum yang di dalamnya berisikan tentang hak pilih dalam pemilihan kepala daerah, penyandang disabilitas mental dan Hak Asasi Manusia.

BAB III PEMBAHASAN

Menjelaskan pengaturan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah bagi penyandang disabilitas mental di Indonesia dan bagaimana pengaturan ideal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan atas uraian-uraian pada bab ini sebelumnya serta melampirkan saran yang berkenaan dengan pembahasan penulis yang ada dalam proposal skripsi ini dan pada akhirnya proposal ini penulis akan menampilkan daftar pustaka yang menjadi acuan dan sumber penelitian penulis.